

ABSTRAK

Nama : Rifta Mufrida

NIM : 1410517003

TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DESA

(Studi Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola administrasi pembangunan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkap aspek pengelolaan administrasi pembangunan desa secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa menurut Indrawan (5067) adalah suatu proses penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa dalam meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena selain melaksanakan berbagai program pemerintah pusat, Pemerintah Desa juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat yang berada diwilayahnya

Kata kunci: tata kelola, administrasi desa

ABSTRACT

Name : Rifta Mufrida

NIM : 1410517003

VILLAGE DEVELOPMENT ADMINISTRATION GOVERNANCE

(Study in Paleran Village, Umbulsari District, Jember Regency)

This study aims to determine the governance of development administration in Karangduren Village, Balung District, Jember Regency, by using descriptive research methods through a qualitative approach. The results of the study reveal that the management aspects of village development administration in general are in accordance with what is stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 7 of 2006 and Permendagri No. 61 of 2007, the Governance Pattern is an internal regulation that is intended as an effort to make public service institutions more efficient, effective and productive. This governance pattern will regulate the organization, governance, accountability and transparency of the organization.

The implementation of the village administration according to Indrawan (5067) is a process of administering the Village Government in increasing the success of government programs and in efforts to mobilize community participation in village development, because in addition to implementing various central government programs, the Village Government is also required to be able to serve the community in its area

Keywords: governance, village administration

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa setidaknya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut¹: (1) Fungsi pengaturan yaitu fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan pemerintahan; (2) Fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk melayani masyarakat baik yang sifatnya pemberian jasa ataupun layanan; (3) Fungsi pemberdayaan yaitu fungsi yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka memandirikan masyarakat menuju civil society. Fungsi ini meliputi kegiatan penyuluhan, pembinaan, pemberian fasilitas, pelatihan, pendidikan dan sebagainya; (4) Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat desa; dan (5) Fungsi ketentraman dan ketertiban yang berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang disebabkan oleh unsur manusia (human error) atau unsur alam (natural error).

Berdasarkan kelima fungsi pemerintah tersebut dapat kita lihat bahwa begitu kompleksnya fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini tentunya menuntut pemerintah desa melakukan pengelolaan administrasinya dengan baik.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola

administrasi pemerintahan desa, penyelenggara pemerintah desa, akan membantu meringankan tugas kepala desa dan perangkat desa dibidang administrasi desa, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan laporan administrasi dan pertanggungjawabannya.

Administrasi desa dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II, tentang Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa, 2014:103 adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan, dan pembangunan serta, penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif.

Sejauh ini administrasi pemerintahan desa telah terselenggara cukup lama, namun hal ini masih terdapat banyak kekurangan dalam kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perangkat desa yang menjadikan kepentingan warga sebagai keuntungan individu, seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pada dasarnya warga tidak dikenakan biaya sama sekali, namun masih banyak perangkat desa yang memungut biaya dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan alasan sebagai biaya pengganti sarana dan prasana yang telah digunakan. Selain itu, banyak perangkat desa yang masih melakukan korupsi terhadap dana warga desanya, namun dibalik sisi negatif itu pula masih ada beberapa desa yang menerapkan kejujuran dan keadilan bagi warga desanya. Hampir tidak ada sama sekali kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap warga desanya.

Jika mengacu pada Permendagri No 32 Tahun 2006 maka akan didapatkan ada 7 administrasi desa yang lazim belum diterapkan oleh Pemerintah Desa. pertama buku data tanah desa, buku data tanah milik desa, buku agenda, buku

mutasi penduduk, buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan, Buku agenda BPD, Buku ekspedisi BPD.

Penyebab terkendalanya penerapan administrasi desa karena kurang ada sosialisasi terhadap pemerintah desa. Kemudian anggaran atau biaya untuk mengimplemmentasikan secara optimal juga berpengaruh, dimana dalam proses pelatihan ataupun sosialisasi juga membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari proses sosialisasi sampai pada proses evaluasi pemerintah kabupaten maupun kecamatan.

Hubungan kerja antar pemerintah desa juga tidak terlalu kondusif dalam menjalankan pemerintahan desa. Diantaranya Kepala Desa dan Sekretaris desa tidak terlalu solid dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Contoh konkritnya yaitu, ada yang menjadi urusan sekretaris desa tapi kemudian kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa harus mengintervensi dan mengambil tugas tersebut dalam bentuk administratif desa.

Penyebab tidak berjalan dengan baik tata kelola administrasi diantaranya disebabkan karena profesionalitas perangkat desa yang masih minim dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di desa menurut konstitusi yang menjadi pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian tata kelola administrasi desa tidak berjalan dengan baik serta terdapat administrasi desa yang mengalami kekosongan, di karenakan tidak dilengkapi dengan sarana prasaran penunjang.

Hal tersebut menandakan peran serta yang konkrit dan kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik itu pemerintah daerah Bupati dan Camat, yang memegang tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi pelaksanaan administrasi desa, maupun pemerintah desa sebagai salah satu unsur dalam implementasi tata kelola administrasi desa. Artinya harus ada korelasi intens antara pengawas pelaksana administrasi desa yaitu bupati dan camat serta

penyelenggaraan administrasi desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi desa dan penyelenggaraan administrasi desa. Agar penyelenggaraan administrasi bisa diterapkan secara komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu permasalahan yang ada, dengan pendekatan ilmiah, objektif dan secara komprehensif, agar kemudian bisa mendapatkan solusi yang konstruktif untuk dibahas secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul: Tata Kelola Administrasi Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tata kelola administrasi pembangunan desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari. Dengan demikian perumusan masalahnya yaitu: Bagaimana tata kelola administrasi Pembangunan desa Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang tata kelola administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paleran.

Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis.

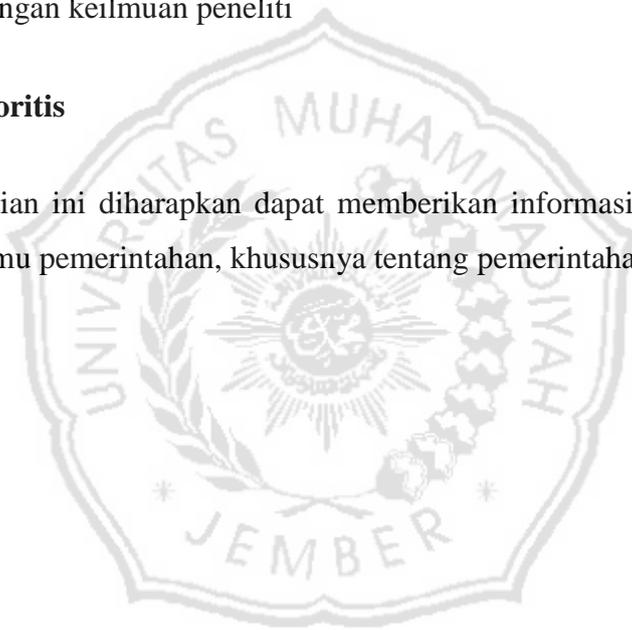
Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang positif bagi:

1. Pemerintah Desa Paleran.
2. Masyarakat Desa
3. Pemangku kepentingan yang terkait
4. Pengembangan keilmuan peneliti

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif dalam penerapan ilmu pemerintahan, khususnya tentang pemerintahan desa



METODE PENELITIAN

Penelitian studi kasus yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data pokok yang berbentuk kalimat, gambar, dan sebagainya. Dengan definisi tersebut, maka penelitian kualitatif deskriptif menjadi acuan peneliti untuk menghasilkan data-data baru.

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang terjadi masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan penelitian. Berkaitan dengan judul penelitian, yang termasuk dalam gejala-gejala sosial yang ada bersifat deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang umumnya berangkat dari pertanyaan *why* atau *how*. Untuk itu teknik penelitian yang digunakan peneliti dengan studi kasus, karena permasalahan yang diteliti lebih sesuai apabila menggunakan studi kasus. Bogdan dan Biklen (1982) menjelaskan studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

Metode ini digunakan karena:

1. Metode kualitatif lebih mudah menggambarkan keadaan dan menyesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya apabila berhadapan langsung dengan kehidupan nyata.
2. Metode ini juga lebih peka dan lebih dimengerti karena peneliti mempelajari fenomena yang terjadi dengan jalan mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan.
3. Informasi detail karena sesuai dengan pandangan responden/informan.
4. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati fenomena yang terjadi dan yang lebih difokuskan kembali kepada tata kelola Administrasi di Desa Paleran.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil data tertulis karena bersifat naratif dan deskriptif. Jenis data tertulis terdiri atas hasil wawancara. Serta dari pihak luar (eksternal) meliputi informasi dari media massa yang berkaitan dengan judul (majalah, artikel, dan berita lain yang disiarkan melalui media massa).

Menurut McMillan & Schumacher (2003) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang akan memberikan berbagai informasi dari informan yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan yang diteliti dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Informasi Kunci (*KeyInformant*)
 1. Informasi Kunci (*KeyInformant*) yaitu informan yang memiliki berbagai pokok informasi yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang memberi informasi secara mendalam dalam permasalahan yang diteliti. Informan kunci ini diantaranya dia yang menguasai atau memahami sesuatu yang menjadi pusat penelitian, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui

tetapi juga dihayati. Dalam penelitian ini, yang menjadi *key informant* adalah:

1. Kepala Desa Paleran
2. Sekretaris Desa
3. Pendamping Lokal Desa
4. Ketua TPK
5. Bendahara TPK
6. Sekretaris TPK
7. Anggota TPK

b. Informan Kedua (*second informant*)

Informan Kedua (*second informant*) yaitu informan yang sama pentingnya dengan informan kunci, sama-sama memberikan informasi penting yang turut mendukung berhasilnya penelitian. Informan kedua membantu melengkapi berbagai informasi yang telah disampaikan informan kunci. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan kedua yaitu masyarakat desa.

1. Tokoh Agama (Kodri)
2. Kepala Urusan Pemerintahan
3. Perwakilan Masyarakat Desa Paleran
4. Ketua BPD Desa Paleran

c. Informan Tambahan

Informan Tambahan/Pendukung yaitu informan yang mempunyai informasi tambahan, dan dapat melengkapi hasil data dari informan kunci. Informan tambahan ini berdasarkan rekomendasi dari informan kunci.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menentukan informan kunci, informan kedua dan informan tambahan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang merupakan teknik sampling dengan menentukan criteria yang tepat pada informannya. Teknik ini paling banyak dipakai ketika peneliti tidak

banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Pengambilan sampel untuk suatu populasi dapat dilakukan dengan cara mencari contoh sampel dari populasi yang kita inginkan, kemudian dari sampel yang didapat dimintai partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel lagi, seterusnya hingga jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang terdiri sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Teknik wawancara dalam Moelong (2005), merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrument yaitu berupa pedoman wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai langsung informan/narasumber dengan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan demensi perjalanan dalam memilih mengenakan hijab sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak

memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.

Peneliti selanjutnya memilih subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis di atas.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Menurut Patton dalam (Poerwandari, 1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Menurut Patton dalam (Poerwandari, 1998) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena:

- a) gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.

- b) Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c) Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- d) Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- e) Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada
- f) Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi mendukung untuk kelengkapan data dalam proses penelitian. Dokumentasi adalah teknik kedua dan terakhir dalam pengumpulan data yang bersifat tercetak. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan serta mendukung berhasilnya penelitian seperti, buku-buku, artikel, ataupun berita yang terkait.

3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian (Bungin, 2007).

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data-data sekunder disini berhubungan dengan gambaran umum para pengguna jalan raya di kota Jember, dan dalam kegiatan wawancara dengan subjek peneliti.

4. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka untuk mendukung kelengkapan data dalam proses penelitian. Studi pustaka adalah teknik terakhir yang di pakai oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai sumber informasi sehingga data-data yang dibutuhkan lengkap. Studi pustaka bersifat

tercetak (*printed*) seperti buku-buku dan tulisan-tulisan. Peneliti mendapatkan mulai dari artikel hingga karya ilmiah yang berkaitan dengan tema dan judul yang diambil.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat berupa kata-kata, kalimat, atau narasi, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Bogdan dan Sugiyono menjelaskan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Penyajianya dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Peneliti menganalisa data ke dalam beberapa tahap antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya.
- b. Data-data yang di dapat kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan.
- c. Data yang telah dikumpulkan dan di susun kemudian diinterpretasikan.
- d. Berdasarkan analisa dan penafsiran yang dibuat, ditarik kesimpulan serta saran untuk kebijakan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Dengan berbagai pertimbangan dasar oleh peneliti.

2. Waktu Penelitian: Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Februari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshidiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

CST, Kansil. 2004 Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, Jakarta :Sinar Grafika.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

HR, Syakuni. 2003. Akses Dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik . Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah.

Indrati S, Maria Farida. 2011. Ilmu Perundang Undangan 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan). Yogyakarta :

Kanisius.Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Jakarta: P.T Asdi Mahasatya.

Miles, Matthew dan Hubberman.2007. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.
Jakarta: Sinar Grafika.

Sedarmayanti, 2007. Good Governance (Kpemerintahan Yang Baik) Dan Good
Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik) . CV.
MandarMaju : Bandung.

Suharno. 2010. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat Jakarta. PT
GramediaPustaka Utama.

Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan
Utuh. Jakata: P.T RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember tahun 2015 Tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Desa APBDes.

Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Paleran.

.Peraturan Desa Paleran Nomor : 144 / 001 / 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

C. Dokumen , Jurnal, dan Internet

RPJMDesa Desa Paleran

RKPDesa Desa Paleran tahun Anggaran 2017

Administrasi Desa Paleran tahun Anggaran 2017

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Nurwachid Febri Effendi.2011. “Peranan kepala desa dalam rangka pengelolaankekayaan desa (Studi Kasus Di Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten)”

Jaitun.2013. “Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung”.

Lukian Evan Pranada.2010. “wewenang Badan Permusyawaratan Desadalam penetapan APBDes di Desa Candisari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2009”